

Volume 7. Nomor 1 April 2017

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Mitra Bestari

Dr.Hermawan M.Si – FISIP Universitas Brawijaya Malang
Dr.Lely Indah Mindarti M.Si –FISIP Universitas Brawijaya Malang

Penyunting/ Editor

Dr.Diana Hertati. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Dra. Sri Wibawani. M.Si

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE
Volume 7. Nomor 1 April 2017

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahNya, hingga April 2017 ini Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE Progdil Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur telah menerbitkan Volume 7 Nomor 1. Penerbitan Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacup pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, April 2017

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 7. Nomor 1 April 2017

DAFTAR ISI

1. IMPLEMENTASI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (COMPUTER BASED TEST, CBT) DI SMP NEGERI 1 SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO
Sa'adatul Maziidatil Ula dan Ertien Rining 1
2. IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DUSUN AMBENG-AMBENG DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
Nosa Arighi Bachtiyar dan Sri Wibawani 13
3. ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN DALAM MEMILIH PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (Studi kasus di Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya)
N. Purnomolastu 27
4. MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) "BROADBAND LEARNING CENTER" (BLC) PADA PT. TELKOM
Yunita Mariana Putri Dan Saifuddin Zuhri 39
5. TINGKAT KEPATUHAN UPN "VETERAN" JAWA TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Tukiman, Herlina Suksmawati, Budi Prabowo 50
6. EFEKTIFITAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PEMANFAATAN DANA DESA GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Agus Widiyarta 64
7. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI HUMAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
Putri Ayu Ainun Nikmah dan Lukman Arif 82
8. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF GREEN CITY DI KOTA SURABAYA
Diana Hertati..... 95
9. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA
Rusdy Hidayat Nugroho dan Edy Purnomo 108

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DUSUN AMBENG-AMBENG DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Nosa Arighi Bachtiyar dan Sri Wibawani

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email : Wibawani2002@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh pencanangan Kampung Keluarga Berencana di dusun Ambeng-Ambeng, desa Ngingas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana sumber data diperoleh dari informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara yang kemudian di analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan data dengan fokus penelitian menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn tentang Implementasi Kebijakan Publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, implementasi program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng telah berjalan baik. Hanya saja ada salah satu kegiatan yang belum terlaksana, yakni Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Remaja. Tujuan umum program ini masih dalam proses pencapaian dikarenakan program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng dimulai Januari 2016. Sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, dan karakteristik organisasi telah mendukung terimplementasinya program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng. Lingkungan sosial di Dusun Ambeng-Ambeng pada umumnya mendukung program Kampung KB. Lingkungan ekonomi Dusun Ambeng-Ambeng amat mendukung masyarakat berpartisipasi dalam program ini. Di sisi lain, tidak ada kegiatan politik yang menjadi lingkungan politik dalam implementasi program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng. Sikap pelaksana sudah mendukung terimplementasinya program Kampung KB.

Kata Kunci : Implementasi, Kampung Keluarga Berencana

ABSTRACT

This research is based on the launching of the Family Planning in Ambeng - Ambeng Hamlet, Ngingas Village. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the Family Planning Program in Ambeng - Ambeng Hamlet, Ngingas Village, District Waru, Sidoarjo.

The method used in this research is descriptive qualitative. The data used are primary and secondary data, where the data sources obtained from informants were selected based on purposive sampling. The data collection techniques using the method of observation, documentation, and interviews then was analyzed the data reduction, data presentation, and concludes data with a focus on using the theory of Van Meter and Van Horn on the Implementation of Public Policies.

The results of this research indicate that generally, the implementation of family planning program in Ambeng - Ambeng Hamlet have been going well. Only there is one activity that has not been done, the Youth Counseling Center (PIK) Youth. The general objective of this program is still in the process of achieving the program due to family planning program in the ambeng-ambeng hamlet started in January 2016. The resources, the quality of interorganizational relations, and the characteristics of the organization has supported the implementation of family planning programs in the Ambeng-Ambeng Hamlet. The social environment in Ambeng-Ambeng Hamlet generally supporting the family planning program. Economic environment Dusun-ambeng ambeng strongly supports the public to participate in this program. On the other hand, there is no political activity becomes political environment in the implementation of family planning program in Ambeng - Ambeng Hamlet. The attitude of the implementing already support the implementation of Village Family planning program.

Keywords: *Implementation, Family Planning Village*

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan sumber daya atau aset suatu bangsa. Penduduk yang produktif merupakan suatu potensi atau aset pembangunan. Sedangkan penduduk yang non produktif merupakan suatu beban bagi pembangunan. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa. Ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi, maka dituntut kualitas hidup atau kemakmuran semakin tinggi. Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan suatu beban atau suatu refusi. Karena bagi Negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan. Karena jumlah penduduk Indonesia

saat ini sudah cukup banyak untuk suatu negara berkembang tetapi kualitas hidup atau kemakmurannya masih rendah dilihat berdasarkan GDP (*Gross Domestic Product*) atau biasa disebut PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) mencanangkan Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pencanaan kampung KB tersebut adalah langkah untuk menjalankan kembali program pemerintah mengenai

Keluarga Berencana yang sudah mulai sedikit peminatnya.

Pencanangan Kampung KB ini merupakan langkah untuk menyuluhkan kepada masyarakat agar dalam menerima pelayanan KB bisa lebih efisien dan lebih cepat. Dalam masa pertumbuhannya, nantinya masyarakat bisa hidup lebih berkualitas lagi. Jika pencapaian program kampung KB di wilayah Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru cukup baik, maka wilayah tersebut bisa dikatakan layak sebagai percontohan Kampung KB karena wilayah tersebut padat penduduk dan juga padat industri. Diharapkan Kampung KB menjadi figur pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah tingkat RW, Dusun, Kelurahan atau yang setara dengan syarat atau kriteria yang telah ditentukan.

Kampung KB ditujukan bagi daerah yang miskin, padat penduduk, terpencil, wilayah pesisir pantai, atau perbatasan suatu wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang sangat minim. Tetapi karena di Kota Sidoarjo tidak ada desa dengan kriteria tersebut maka Desa Ngingas dipilih karena padat penduduk dan pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) sangat rendah. Komitmen dan partisipasi berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan, baik itu komponen dari pemerintah daerah maupun komponen masyarakat seperti tokoh warga dan masyarakat sangat penting agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat

LANDASAN TEORI

1. Tujuan Kebijakan dan Standar

Tujuan kebijakan dan standar, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Secara operasional dalam fokus ini terdapat tujuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat dusun Ambeng-Ambeng dan juga standar pelaksanaan program Kampung KB.

2. Sumber Daya

Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi). Keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya biaya merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Meliputi:

- a. Sumber daya manusia dalam implementasi yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Waru.
- b. Sumber daya biaya yaitu biaya alat penunjang program Keluarga Berencana.
- c. Sumber daya waktu yaitu pelaksanaan atau dicanangkannya Kampung KB di Dusun Ambeng-

Ambeng, Desa Ngingas,
Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo.

3. Kualitas Hubungan
Interorganisasi atau Komunikasi
Antarorganisasi

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan prosedur dan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi. Dengan sasaran kajian yaitu komunikasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke Pemerintah Kabupaten lalu ke masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru.

4. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Sasaran kajian dalam penelitian ini yaitu karakteristik organisasi dinas yang mengupayakan target program-program yang diselenggarakan di Kampung KB.

5. Lingkungan Politik, Sosial, dan
Ekonomi

Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi). Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi disebut sebagai lingkungan eksternal. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Keberhasilan implementasi dapat terjadi jika lingkungan eksternalnya kondusif oleh sebab itu lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dengan sasaran kajian yaitu lingkungan politik, sosial, dan ekonomi di Kampung KB Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

6. Sikap Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap). Dengan sasaran kajian yaitu sikap masyarakat terhadap program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan batas yang harus dilalui oleh sang peneliti dalam melaksanakan

suatu penelitian (Moleong, 2006:97). Berkaitan dengan hal-hal tersebut, bahwa fokus penelitian pada dasarnya adalah suatu masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah dari aktivitas penelitian sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap obyek penelitian, yaitu Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Williams dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Definisi tersebut memberi gambaran bahwa penelitian ini mengutamakan latar belakang alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Kebijakan dan Standar

Menurut Meter dan Horn dalam Anggara (2014:232) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Terdapat dua tujuan dari program Kampung KB, yakni Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan umum Kampung KB adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan hasil temuan di atas tentang fokus pertama yaitu tujuan kebijakan atau standar yang jelas dapat dinyatakan bahwa tujuan umum kampung KB telah tercapai. Hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat akan program tersebut serta meningkatnya jumlah pengguna KB di dusun Ambeng-Ambeng. Sedangkan Tujuan Khusus dari Kampung KB adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa lembaga pemerintah turut berperan dalam kebijakan ini. Hal ini dapat diketahui dengan dibiayainya program ini melalui APBN dan APBD. Akan tetapi, peran lembaga

non pemerintah dan swasta dalam mengembangkan program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng masih belum ada hingga saat ini.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan; Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti program – program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tergolong tinggi. Ini merupakan indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng tentang pembangunan berwawasan kependudukan, salah satunya program KB.

c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern
Data yang diperoleh di hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif modern meningkat secara signifikan setelah diadakannya program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

b. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita, BKR, BKL, dan PIK.

Program Kampung KB, yakni Bina Keluarga Balita, BKR, dan BKL sudah dibentuk dan dilaksanakan hingga saat ini. Akan tetapi, program PIK Remaja baru terbentuk pada bulan Juni dan saat ini belum berjalan. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari remaja yang bersedia untuk menjalani program tersebut.

c. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS
Program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera) sudah terbentuk dan dilaksanakan juga.

d. Menurunkan angka KDRT
Berdasarkan hasil penelitian, semenjak diadakannya Kampung KB, tidak ada laporan KDRT di Dusun Ambeng-Ambeng. Hal ini menunjukkan menurunnya angka KDRT setelah diadakannya Kampung KB ini.

e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian, derajat kesehatan masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng, yakni kesehatan balita serta angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkat.

f. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah
Rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah belum bisa dilihat dikarenakan program ini baru berjalan pada Januari 2016.

g. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung
Sarana dan Prasarana pembangunan kampung baru direncanakan dan baru akan diimplementasikan pada tahun 2017.

h. Meningkatkan sanitasi lingkungan kampung yang sehat dan bersih.

Fasilitas sanitasi lingkungan kampung yang sehat dan bersih sama seperti sarana dan prasarana, yakni baru akan dibangun pada tahun 2017.

i. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di kelompok PIK KRR/remaja.

Dikarenakan program PIK belum berjalan, maka tujuan ini belum tercapai.

j. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan

social budaya di kelompok PIK KRR/mahasiswa.

Dikarenakan program PIK belum berjalan, maka tujuan ini belum juga belum tercapai.

Sementara itu, standar yang digunakan dalam kampung KB Dusun Ambeng-Ambeng, Dusun Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo adalah Petunjuk Teknis Kampung KB Tahun 2015 dari BKKBN. Standar tersebut telah dilaksanakan dalam pengimplementasian kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng

Dalam pelaksanaan implementasi, Juknis Kampung KB juga sangat diperlukan, karena dengan adanya standar, yakni Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program kampung KB berjalan dengan baik dan lancar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan umum program ini telah tercapai, akan tetapi ada beberapa tujuan khusus dalam program ini yang belum terlaksana, diantaranya yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Remaja. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari remaja yang mau berpartisipasi dalam program ini.

2. Sumber Daya

Sumber daya yakni termasuk dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi. Sumber daya dalam implementasi program kampung KB mempunyai pengaruh yang sangat penting.

Dari sumber daya manusia, untuk mengimplementasikan program-program Kampung KB sudah cukup baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Para

petugas dalam menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB mengadakan rapat-rapat koordinasi secara rutin dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana pengembangan kegiatan dikoordinasikan melalui forum musyawarah dan sebagainya.

Sumber daya biaya, masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendapatkan pelayanan KB. Seperti suntik KB, implan, IUD, Pil KB, dan alat kontrasepsi lainnya karena program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng. Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dibiayai oleh APBN Perwakilan BKKBN Provinsi, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Keluarga Berencana, Alokasi Dana Desa, atau lintas sektor terkait.

Sumber daya waktu dapat dilihat dari peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi, peningkatan kualitas pelayanan KB, pertemuan berkala kelompok kegiatan Posyandu, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. Selain itu juga meningkatnya presentasi peserta KB yang aktif, meningkatnya keikutsertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dan semua masyarakat terlayani dalam masing-masing program yang ada.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik sumber daya manusia, sumber daya biaya, dan sumberdaya waktu yang berkaitan dengan implementasi kampung KB di dusun Ambeng-Ambeng maupun PLKB sangat mendukung pengimplementasian program ini.

3. Kualitas Hubungan Interorganisasional
Kualitas hubungan interorganisasi juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pelaksana sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, hubungan interorganisasi atau komunikasi antarorganisasi adalah menggunakan sistem KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada individu, sekelompok orang, maupun masyarakat luar. Dimana KIE dilakukan melalui upaya advokasi dan penggerakan, konselling, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97) Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal interorganisasional, pihak Dusun

Ambeng-Ambeng serta Kecamatan Waru rutin melakukan rapat koordinasi mengenai program kampung KB. Hasil dari rapat koordinasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak PLKB untuk kemudian ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang saling terkoordinasi antara pihak desa, kecamatan, dan PLKB.

Sedangkan dalam hal ini pihak PLKB di Dusun Ambeng-Ambeng telah memberikan beberapa penyuluhan kepada masyarakat dan juga mengadakan beberapa program yang dapat menunjang terwujudnya kampung KB. Selain itu mereka juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Maka dari itu penulis menganalisis komunikasi yang berkaitan dengan tranmisi kepada para instansi terimplementasi dengan baik. Hal ini menyebabkan baiknya kualitas hubungan interorganisasional dalam pengimplementasian program.

4. Karakteristik Organisasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau

luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Pelaksana program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng di antaranya Kepala Desa Ngingas dan BPMPKB. Masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng adalah masyarakat yang partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka untuk mengikuti program-program kampung KB ini. Hal ini tidak lepas dari peran Kepala Desa Ngingas yang turut memotivasi serta mengajak masyarakat untuk mengikuti program-program kampung KB. Selain itu, karakteristik BPMPKB adalah bertanggungjawab dan tanggap.

Dari sini dapat dilihat bahwa pelaksana, yakni Kepala Desa Ngingas merupakan pelaksana yang persuasif. Karakter BPMPKB yang tanggap terhadap masyarakat menandakan bahwa mereka bekerja sesuai asas demokrasi, yakni bekerja untuk rakyat. Bersifat persuasif di sini terlihat dari sikap kepala desa yang selalu memotivasi serta mengajak masyarakat untuk mengikuti program-program kampung KB. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana program kampung KB ini amat mendukung jalannya kegiatan ini.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat penting pada keinginan dan kemampuan para pelaksana. Lingkungan eksternal dalam hal ini lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang mendorong keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dalam kondisi lingkungan

yang dimaksud yaitu lingkungan di Dusun Ambeng-Ambeng, Desa Ngingas, kecamatan Waru.

Menurut pendapat Friedrich yang dikutip oleh Wahab (2004:3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, lingkungan sosial masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi pada program Kampung KB. Masyarakat yang belum berpartisipasi adalah yang notabenehnya sudah lansia (lanjut usia) karena mereka cenderung malu untuk mengikuti program BKL, sehingga tidak sepenuhnya lansia aktif dan berpartisipasi dalam program tersebut.

Sedangkan lingkungan ekonomi Dusun Ambeng-Ambeng, dimana warganya memiliki mata pencaharian home industry sepatu dan sandal sebagian besar dan home industry baja sebagian kecilnya. Namun, sebagian besar masyarakat di dusun tersebut merupakan pengrajin, bukan pemilik home industry tersebut. Umumnya gaji pengrajin tersebut tidak mencapai satu juta tiap bulannya. Penghasilan tersebut tergolong rendah karena jauh di bawah UMK Kabupaten Sidoarjo yang lebih dari 3 juta. Hal ini menyebabkan Dusun ini tergolong dusun yang memiliki mayoritas penduduk miskin. Dengan

diadakannya program kampung KB ini, masyarakat pun turut menyadari bahwa pembatasan jumlah anak tiap keluarga perlu untuk masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Hal ini membuat masyarakat di Dusun Ambeng-Ambeng tidak sulit untuk diajak berpartisipasi dalam program kampung KB ini.

Terakhir, di Dusun Ambeng-Ambeng tidak terdapat kantor milik partai politik serta anggota dewan. Hal ini menyebabkan masyarakat dusun Ambeng-Ambeng jauh dari pengaruh lingkungan politik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial di dusun Ambeng-Ambeng kurang mendukung dalam program BKL. Sedangkan lingkungan ekonomi Dusun Ambeng-Ambeng amat mendukung masyarakat berpartisipasi dalam program ini. Di sisi lain, lingkungan politik di Dusun Ambeng-Ambeng tidak memiliki pengaruh terhadap jalannya program ini.

6. Sikap Pelaksana

Menurut Edward III dalam Anggara (2014:253) Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses

pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit.

Sikap pelaksana yakni termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap. Pelaksana merupakan seluruh orang yang terlibat dalam pelaksanaan program kampung KB ini, diantaranya yakni masyarakat dan anggota PLKB yang terjun di Dusun Ambeng-Ambeng.

Pengetahuan serta pemahaman tujuan kebijakan masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng terbilang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat, terutama kader dari program tersebut dapat menjawab saat ditanyakan mengenai tujuan kampung KB ini. Sedangkan pengetahuan serta pemahaman mengenai isi kebijakan kampung KB di masyarakat sendiri masih kurang. Ini ditunjukkan dengan tidak tahunya sebagian masyarakat mengenai isi dari program BKR. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari BPMPKM mengenai isi dari program kampung KB dan belum terlaksananya sebagian program kampung KB. Sedangkan pengetahuan serta pemahaman isi dan tujuan kebijakan pada PLKB sendiri tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan dijalankannya program kampung KB ini oleh PLKB berdasarkan juknis.

Sikap masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng atas kebijakan program kampung KB ini yakni amat antusias. Umumnya masyarakat dusun ambeng-ambeng turut berpartisipasi dalam program kampung KB ini. Sedangkan sikap

PLKB atas kebijakan program ini sudah tergolong baik karena berdasarkan hasil penelitian, petugas PLKB di Dusun Ambeng-Ambeng selalu siap dan tanggap untuk melayani masyarakat untuk mengikuti program Kampung KB. Selain itu mereka juga cepat dan sigap dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan program Kampung KB.

Secara keseluruhan, intensitas sikap masyarakat maupun pegawai PLKB terhadap program ini tergolong tinggi. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian, dari awal program ini diluncurkan hingga sekarang sikap pelaksana program ini sama baiknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, sikap pelaksana sudah mendukung terimplementasinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 dalam penerapan program Kampung KB. Hanya saja pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan isi dari program kampung KB masih kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara umum, implementasi program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng telah berjalan baik. Hanya saja ada salah satu kegiatan yang belum terlaksana, yakni Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Remaja. Selain itu, sebagian lingkungan sosial, yakni lingkungan dimana program BKL diadakan kurang mendukung berjalannya program BKL dengan lancar. Di sisi lain, pengetahuan

masyarakat Dusun Ambeng-Ambeng mengenai isi dari program Kampung KB pun masih kurang.

2. Tujuan umum program ini masih dalam proses pencapaian dikarenakan program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng dimulai Januari 2016. Di sisi lain, program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng yang terlaksana diantaranya BKR, BKB, BKL, dan UPPKS. Namun, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Remaja belum terlaksana dikarenakan sulitnya mencari remaja yang mau berpartisipasi dalam program ini. Program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng telah memiliki standar, yakni Petunjuk Teknis Kampung KB dari BKKBN Tahun 2015 dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis tersebut.
3. Sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, dan karakteristik organisasi telah mendukung terimplementasinya program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng.
4. Lingkungan sosial di Dusun Ambeng-Ambeng pada umumnya mendukung program Kampung KB. Namun pada kegiatan BKL lingkungan sosial kurang mendukung dikarenakan umumnya para lansia merasa malu untuk mengikuti kegiatan BKL.
5. Lingkungan ekonomi Dusun Ambeng-Ambeng amat mendukung masyarakat

berpartisipasi dalam program ini. Hal ini karena kegiatan *home industry* Dusun Ambeng-Ambeng yang mengambil pekerja dari warga setempat memberikan upah di bawah UMR menjadi lingkungan ekonomi yang mendorong mereka untuk memiliki jumlah anak yang sedikit, sehingga mendukung terlaksananya kampung KB. Di sisi lain, tidak ada kegiatan politik yang menjadi lingkungan politik dalam implementasi program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng.

6. Sikap pelaksana yakni pengetahuan serta pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, dan intensitas sikap, pada umumnya sudah mendukung terimplementasinya program Kampung KB. Akan tetapi pengetahuan dan pemahaman isi dari program Kampung KB pada masyarakat masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui isi dari program Kampung KB.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran, antara lain:

1. Diperlukan penyuluhan tentang program Kampung KB lebih sering yang sebelumnya hanya dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sekali seharusnya dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan.

2. Karena program PIK belum berjalan dikarenakan kendala para remaja yang enggan ikut berpartisipasi, disarankan untuk digerakan oleh para remaja Masjid yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini karena berdasarkan gambaran umum, terdapat banyak remaja di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press
- Bungin, M, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John, w. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles, Mathew B., Michael, Huberman, dan Johnny, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London, Sage Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi*

- Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella, Jauvani, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Basrowo. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2007. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soekarwo. 2015. *Pakde Karwo Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardikanto, Totok, dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan masyarakat, dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015 *Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana*.
- Internet:**
- Soerabaia NewsweekMonday. 2016. *BKKBN Canangkan Dusun Ambeng-Ambeng Sebagai Kampung KB*, (online), (<http://www.surabaya.ewsweek.com/2016/03/bkkbn-canangkan-dusun-ambeng-ambeng.html>), diakses 29 Agustus 2016)
- Eko Prasetya. 2016. *Ikuti Arahan Jokowi, BKKBN Bentuk Kampung KB*, (Online), (<https://www.merdeka.com/peristiwa/ikuti-arahan-jokowi-bkkbn-bentuk-program-kampung-kb.html>), diakses 30 Agustus 2016)
- Karya Akademis:**
- Wardani,FK, 2010, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
- Merrynce, Hidir, Ahmad, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4 No. 1
- Peraturan-peraturan:**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

- 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga